

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2021

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Merujuk Rencana Strategis Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021 untuk Tahun 2017-2021 sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. Tabel IKU Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula	Sumber Data	PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3		5	4	6	7
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan peruntukannya	100%	= (luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada tahun N/ luas kawasan hutan yang dibebani izin pada tahun N) x 100 %	Intern: Data diperoleh dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang diberi izin yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	
		b. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	76%	= (realisasi produksi HHK dan HHBK tahun N/target produksi HHK dan HHBK tahun N) x 100%	Ekstern: Data diperoleh dari laporan PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi) dari wajib bayar (unit manajemen), instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota pada tahun N dan laporan tersebut akan direkonsiliasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi bersama dengan wajib bayar (unit manajemen) dan Instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota terkait.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, DAN UPTD KPHL-BB DINAS KEHUTANAN	

		c. Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	76%	= (realisasi penerimaan negara sektor kehutanan tahun N/ target penerimaan negara sektor kehutanan tahun N) x 100%	Ektern: Data diperoleh dari laporan PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi) dari wajib bayar (unit manajemen), instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota pada tahun N dan laporan tersebut akan direkonsiliasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi bersama dengan wajib bayar (unit manajemen) dan Instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota terkait.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	
2.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	630.695 hektar	= (0.8 dikalikan angka jumlah tanaman yang ditanam pada tahun N-5/ luas lahan kritis) x 100%. Dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam	Intern: data diperoleh dari laporan hasil penghitungan jumlah pohon yang ditanam pada tahun N-5. (dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam)	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN, UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN, UPTD KPHL - BB	
		b. Persentase penurunan luas kerusakan hutan	0.61%	= (luas kerusakan hutan dikurang luas kawasan yang diamankan atau dikonservasi / luas hutan lindung dan hutan produksi (HP, HPT, HPK)) X 100%	Intern: Data diperoleh dari laporan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penanganan laporan tipihut dan monev kasus	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE	

		c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik panas (hotspot)	= (penurunan titik panas (hot spot) di Tahun N/ jumlah rerata titik panas (hot spot) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015)) x 100%	Intern: Data diperoleh dari hasil pemantauan melalui satelit NOAA sebagai pendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh tim karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE	
3.	Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	33.712 Ha	= (luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat atau kemitraan pada tahun N/ jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi) x 100%	Intern: Data diperoleh dari laporan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditunjuk untuk melakukan proses pengusulan hingga verifikasi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan.	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,59 % (BB)	Adanya Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja Eselon II, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi dan Cascading	Jumlah nilai evaluasi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi	SEKRETARIAT	
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	94.08%	= Rata-rata realisasi fisik dan realisasi keuangan dikalikan angka 100 persen	Data yang diperoleh dari laporan setiap bidang dan realisasi SPJ yang diajukan	SEKRETARIAT DAN SELURUH BIDANG	

Sembilan IKU tersebut di atas akan menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017-2021. Jika dikaitkan dengan Sasaran Strategis dan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 maka dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Indikator: 1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan
			Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	- Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat
			Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya
			Pembentukan Petak Ukur Permanen	- Terbangunnya petak ukur permanen
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Planologi dan Tata Lingkungan	- Terlaksananya penyiapan kelembagaan pembangunan KPH
		Program Pemanfaatan Potensi SDH	Optimalisasi PNBP	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam

			Pengembang an Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
			Pengembang an Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman
			Pembinaan dan Pengembang an Aneka Guna Hutan (AGH)	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan
			Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH	- Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan
			Pembinaan dan Pengembang an Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	- Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH
			Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH	- Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbina nya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH
2.	Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas
			Pengembang an Perbenihan	- Tersedianya data produksi dan peredaran

Indikator Sasaran: 1. Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2. Persentase penurunan laju kerusakan hutan 3. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)			Tanaman Hutan	benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman
			Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Pengembangan Sarana Konservasi tanah	- Termonitornya bangunan KTA di Kab/Kota Prov Sumbar
			Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	- Tersusunnya rencana pengelolaan DAS
			Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH	- Tersedianya data lahan kritis di wilayah kelola KPH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam		Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi
			Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan

		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan dan Penguatan Lembaga PPHBN
			Pegendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan
			Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar dikawasan hutan wilayah kelola KPH
			Identifikasi dan inventarisasi serta pengembangan kawasan ekosistem essensial dan daerah	- Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat
			Monitoring evaluasi dan pembinaan pengelolaan ekosistem essensial dan daerah penyangga	- Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat
			Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman

				kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Indikator: 1. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan
			Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)
			Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalannya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)
			Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat
			Pengembangan Hutan Mangrove	- Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola hutan mangrove
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Peningkatan Penyuluhan dan	- Terlaksananya BOP kehutanan - Terlaksananya

		Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Tersusunnya data dan informasi kehutanan
			Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Indikator: 1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat-alat tulis kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan
			Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
			Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz
			Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi
			Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya pengadaan meubelair
			Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
			Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas

			Dinas/Mess	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya keikutsertaan aparaturnya dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan
		Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan	Penatausahaan Keuangan SKPD	- Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran
			Penyusunan perencanaan dan	- Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra

		dan Pengendalian Kegiatan dan aset	penganggara n SKPD	
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Monito ring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Program, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan perencanaan kehutanan